

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap studi ini, maka penulis menguraikan terlebih dahulu judul studi **Konstruksi Wacana Tentang Dakwah Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilu 2004 Di Majalah Saksi** sebagai berikut:

1. Konstruksi Wacana

Konstruksi dapat diartikan sebagai pembuatan; rancang bangunan penyusun, susunan bangunan.¹ Wacana adalah rangkaian ujar atau serangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa.²

Dalam studi ini yang dimaksud dengan konstruksi wacana adalah setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda mengenai suatu hal menjadi sebuah wacana. Misalnya konstruksi wacana tentang dakwah politik berarti setiap upaya konseptualisasi tentang dakwah politik dalam sebuah serangkaian ujar atau tindak tutur secara teratur,

¹ Widodo, Amd. Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, 2001, Yogyakarta : Absolut hlm. 332

² Drs. Alex Sobur, M.Si., *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, Bandung: Rosda , hlm. 13

sistematis dalam satu kesatuan. Konstruksi wacana yang dilakukan dapat ditelusuri dan diungkap dengan menggunakan analisis wacana. Untuk kepentingan penelusuran tersebut penulis menggunakan analisis wacana dengan pendekatan aliran kritis. Pendekatan ini memandang analisis wacana tidak hanya sebatas kajian linguistik akan tetapi mencoba menemukan relasi antara konteks sosial yang secara historis melatari terbentuknya teks yang menjadi wacana tersebut.

2. Dakwah Politik

Dakwah politik dapat dimaknai sebagai usaha untuk merealisasikan ajaran Islam dalam kelembagaan politik resmi dengan media partai politik dan mengikuti pemilihan umum.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai peserta pemilu 2004. Partai ini didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H. Pemilu 2004 menempatkan PKS sebagai salah satu partai yang meraih sukses. Perolehan suara partai ini cukup signifikan dan menempati posisi atas. Kesuksesan tersebut bisa juga dilihat, Presiden PKS ketika pemilu berlangsung, Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua MPR.

4. Pemilu 2004

Pemilu 2004 adalah pemilu kedua dalam masa transisi demokrasi. Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu 2004, khususnya pemilihan anggota DPR, DPRD yang melibatkan partai menggunakan sistem proporsional terbuka, yaitu sistem yang memungkinkan pemilih memilih nama calon aleg secara langsung disamping mencoblos parpol.

5. Majalah Saksi

Majalah Saksi adalah majalah bernafaskan Islam bermuatan dakwah dan politik. Majalah ini terbit pertama kali dalam format tabloid mini dengan payung penerbit *Contemporary Society for Islamic Studies* (CONSIST) pada tanggal 28 Agustus 1998 dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 679/SK/MENPEN/SIUPP/1999. Saat ini *Saksi* menempati kantor sendiri di Gedung Kindo Lt. 3 Jl. Duren Tiga No. 101 Jakarta.

Dari uraian di atas dapat penulis tegaskan bahwa yang dimaksud dengan **“Konstruksi Wacana Tentang Dakwah Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilu 2004 Di Majalah Saksi”** adalah sebuah studi yang mencoba melihat dan mengungkap bagaimana media massa dalam hal ini majalah Saksi melakukan konstruksi sebuah realitas Partai Keadilan Sejahtera dalam mengaplikasikan konsep dakwah politik dalam perhelatan akbar pemilu 2004. Adapun melihatnya dengan menggunakan analisis wacana kritis.

B. Latar Belakang Masalah

Gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa dan kelompok masyarakat kritis pada tahun 1998, membuka babak baru kehidupan politik di Indonesia. Sebuah era keterbukaan dimulai. Iklim keterbukaan itu mendorong kekuatan-kekuatan politik yang selama Orde Baru dimarginalkan, secara bebas mengekspresikan dan menawarkan wacana alternatif mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Wacana politik tidak lagi di dominasi oleh satu kekuatan pemerintah yang hegemonik, tetapi cenderung terdistribusi dimana-mana.³

Lebih lanjut, desakan untuk segera menentukan arah perubahan politik itu diakomodasi dalam pemilihan umum yang diyakini sebagai media paling tepat untuk mendapatkan legitimasi rakyat. Wajah perpolitikan semakin berwarna sebagaimana tercermin dalam pemilu 1999 yang diikuti oleh empat puluh delapan kontestan.⁴ Satu dari empat puluh delapan partai politik peserta pemilu tersebut adalah Partai Keadilan (PK) yang kemunculannya menurut temuan Ali Said Damanik, sebagai transformasi dari gerakan tarbiyah yang marak di kampus-kampus.⁵

³ Mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, menandai berakhirnya rezim Orde Baru. Indonesia memasuki masa transisi, dimana platform kenegaraan yang mapan selama Orde Baru mulai dipertanyakan bersamaan bermunculannya tawaran konsep Indonesia Baru dari banyak pihak (aliran pemikiran politik).

⁴ Menjelang pemilu 1999 tercatat tak kurang dari 140 partai politik baru yang dideklarasikan, namun setelah melalui proses verifikasi tersisisa 48 partai politik memperebutkan 500 kursi di parlemen. Lihat, *API – Almanak Partai politik Indonesia 1999*, 1999, Jakarta: API

⁵ Dalam skripsi yang kemudian diterbitkan oleh teraju tersebut, Ali Sasi memaparkan dinamika gerakan tarbiyah selama dua puluh tahun. Transformasi sosialnya mewujud dalam berbagai LSM, majalah dan yang paling fenomenal adalah dideklarasikannya Partai Keadilan oleh gerakan tersebut. Lebih lanjut baca Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, 2002, Jakarta: Teraju

PK adalah kelanjutan dari gerakan dakwah yang dibangun oleh Aktivis Dakwah Kampus (ADK) yang memulai gerakannya sejak pertengahan 1980 dengan membentuk *halaqoh-halaqoh* (kelompok pengajian) sebagai proses pembinaan keislaman.⁶ PK didirikan pada tanggal 20 Juli 1998, dan dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1998 atas prakarsa sejumlah intelektual muslim seperti Dr. Hidayat Nurwahid, MA, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, MSc, Anis Matta beserta 52 orang lainnya yang kemudian disebut sebagai Dewan Pendiri.⁷ Nurmahmudi Ismail kemudian diangkat menjadi Presiden PK dengan Anis Matta sebagai Sekretaris Jenderal.

Berdirinya PK adalah bagian dari desain dakwah untuk membangun kehidupan yang Islami, bukan aktivitas politik praktis semata, sebagaimana pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan, sebagai berikut:

“Partai Keadilan didirikan bukan atas inisiatif seseorang atau beberapa orang aktivisnya, namun merupakan perwujudan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang aspiratif dan demokratis Hasil survei menunjukkan . . . bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk meneguhkan aktivitas dakwah dalam bentuk kepartaian dalam konteks formalitas politik yang ada sekarang.”⁸

Anis Matta menyebut desain dakwah itu sebagai proyek peradaban raksasa, yaitu: “proyek besar bertujuan merekonstruksi pemikiran dan kepribadian manusia Muslim agar berpikir, merasa dan bertindak sesuai

SAKSI ⁶ Suhud Alynudin, *Lokomotif Reformasi Bernama Partai Keadilan*, April 2003, Majalah

⁷ DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, 1998, Jakarta hlm. 50

⁸ *ibid.*, hlm. 19

dengan kehendak Allah swt. atau dengan referensi Islam.”⁹ Untuk menyelesaikan proyek itu, menurut Anis Matta ada empat tahap pekerjaan,

“*Pertama*, membangun sebuah organisasi yang kuat dan solid sebagai kekuatan utama yang mengoperasikan dakwah. Inilah yang disebut dengan *mihwar tanzhimi*. *Kedua*, membangun basis sosial yang luas dan merata sebagai kekuatan pendukung dakwah. Inilah yang disebut dengan *mihwar sya’bi*. *Ketiga*, membangun berbagai institusi untuk mewadahi pekerjaan-pekerjaan dakwah di seluruh sektor kehidupan dan di seluruh segmen masyarakat. Ini yang disebut dengan *mihwar muasasi*. *Keempat*, akhirnya dakwah ini harus sampai pada tingkat institusi negara. Sebab, institusi negara dibutuhkan dakwah untuk merealisasikan secara legal dan kuat seluruh kehendak Allah swt. Atas kehidupan masyarakat. Inilah yang disebut *mihwar daulah*.”¹⁰

Berdasarkan tahapan (*mihwar*) yang dikemukakan Anis Matta, kelahiran PK menjadi tanda bahwa gerakan dakwah yang dibangun telah memasuki *mihwar muasasi*. Artinya, PK harus mampu mewadahi pekerjaan-pekerjaan dakwah di seluruh sektor kehidupan dan di seluruh segmen masyarakat. Titik tekannya, menurut Anis Matta,

“dakwah di *mihwar muasasi* harus dicitrakan sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang memiliki semua kelayakan untuk mengelola negara. Citra itu perlu kita bangun untuk merebut kepercayaan masyarakat bahwa institusi dakwah adalah *the leading political power* yang paling berhak untuk memegang amanat kekuasaan. Itu berarti semua elemen yang ada pada institusi “calon penguasa” harus diekspos secara sistematis ... agar membentuk citra institusi dakwah politik sebagai kekuatan riil yang benar-benar nyata di lapangan.”¹¹

Sebagai institusi dakwah politik, capaian PK cukup fenomenal. Perolehan 7 kursi di DPR RI, 26 kursi di DPRD I dan 158 kursi di DPRD II cukup menggembirakan untuk ukuran partai “bau kencur” yang relatif minim

⁹ Anis Matta, *Menikmati Demokrasi, Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, 2002, Jakarta: Pustaka SAKSI, hlm. 8

¹⁰ *ibid*, hlm. 9-11

¹¹ *ibid*, hlm. 178

dalam pengalaman politik, tanpa tokoh nasional¹², dan tanpa dukungan dana yang memadai. Capaian itu membuat dakwah mereka mengalami lompatan besar. Citra fenomenal yang ditunjukkan selama lima tahun “memaksa” bangsa Indonesia menoleh kepada *manhaj* (konsepsi) dan *fikrah* (Ide/Pemikiran) yang di bawa.¹³

Akan tetapi, Sesuai ketentuan UU Pemilu No. 12 Tahun 2003, PK yang menempati posisi ketujuh¹⁴ dari empat puluh delapan parpol peserta pemilu 1999 tidak dapat mengikuti pemilu 2004 karena terganjal aturan *electoral threshold*. Perolehan suara PK tidak dapat memenuhi syarat *electoral threshold*, yaitu sebesar 2% suara. Untuk dapat mengikuti pemilu 2004 ada dua pilihan yang bisa diambil PK, *pertama*, bergabung dengan partai lain sehingga memenuhi electoral threshold. *Kedua*, penggantian nama partai dan mengikuti verifikasi KPU.

PK memilih jalan kedua, yaitu membuat partai baru yang simbolnya tak jauh beda dengan PK. Nama baru itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Filosofinya, menurut AM Furkon¹⁵ sebagaimana hasil wawancaranya dengan Al Muzzamil Yusuf¹⁶ yaitu, “untuk memberi tekanan yang lebih besar, bukan saja pada perjuangan hukum pada tingkat politik, tapi ingin menyelesaikan

¹² Saat pemilu 1999 sangat sedikit bahkan tidak ada tokoh PK yang dikenal oleh publik sebagai tokoh nasional. Nama-nama seperti Nurmahmudi Ismail, Hidayat Nurwahid, Anis Matta baru dikenal dalam skala yang relatif kecil (sebatas aktivis PK).

¹³ Suhud Alynudin, *Amanah Untuk PK Sejahtera*, Majalah Saksi Edisi Mei 2003

¹⁴ Berdasarkan hasil pemilu 1999, posisi tujuh besar ditempati PDIP dengan 153 kursi, Partai Golkar meraih 120 kursi, PPP mendapat 58 kursi, PKB meraih 51 kursi, PAN 34 kursi, PBB 11 kursi dan PK meraih 7 kursi.

¹⁵ Penulis buku “Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer”. Buku tersebut merupakan pengembangan dari penelitiannya untuk menyelesaikan program pascasarjana di UI.

¹⁶ Ketua Umum PKS yang pertama

persoalan kesejahteraan yang ada pada masyarakat tingkat bawah.” Sedangkan hasil wawancaranya dengan Haryo Setyoko¹⁷, “untuk menggambarkan kesejahteraan dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia, maka lambang padi adalah simbol yang paling relevan.”¹⁸

Dari sini penulis membuat penegasan bahwa dalam studi ini PKS adalah kelanjutan PK dalam melakukan dakwah politik. Setidaknya ada dua alasan yang cukup signifikan berdasarkan temuan AM Furkon, yaitu: *pertama*, kesamaan visi dan misi¹⁹. *Kedua*, para pendiri PKS merupakan pendiri PK.²⁰ Dengan demikian, PKS tetap akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dijelaskan Anis Matta dalam “proyek peradaban raksasa” di atas. Artinya, PKS menjadi pelanjut PK dalam melakukan dakwah politik.

Sebagai kekuatan politik alternatif yang relatif baru, PKS, sebagaimana PK sangat sadar akan urgensi memenangkan wacana publik. Patut di garis bawah tulisan Anis Matta tentang urgensi memenangkan wacana publik,

“Tugas memenangkan wacana publik menuntut kita memiliki media. Akan tetapi, memiliki media saja tidak cukup ... Yang lebih penting adalah kuasailah kerangka pemikiran Islam, pelajari cara mereka (publik) berpikir. tentukan pintu masuk ke dalam akal mereka, pilihlah format bahasa yang sesuai dengan situasi mereka, dan bicaralah pada saat yang tepat. Menjadi *issue maker* mungkin lebih

¹⁷ Sekretaris Umum PKS saat di deklarasikan

¹⁸ Aay M Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, 2004, Jakarta: Teraju, hlm. 291

¹⁹ Aay M Furkon, *ibid* hlm. 291

²⁰ Pada tanggal 20 April 2003 PKS dideklarasikan, Al Muzamil Yusuf sebagai Ketua Umum dan Haryo Setyoko sebagai Sekjen. Pada tanggal 17 April 2003 Musyawarah majlis Syura PK ke-XIII yang berlangsung di Wisma Haji, Bekasi, Jawa Barat memutuskan PK menggabungkan diri dengan PKS dan dikuatkan secara administrasi kenegaraan di hadapan notaris Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang pada tanggal 3 juli 2003 dimana Hidayat Nurwahid dan Anis Matta menjadi Presiden dan Sekjen PKS. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Lihat *ibid*, hlm. 292

strategis ketimbang memiliki media. Tetapi, menjadi keduanya tentu saja lebih sempurna.”²¹

Dalam konteks perjuangan wacana menyongsong pemilu 2004, PKS relatif lebih siap dibandingkan saat menghadapi pemilu 1999 saat masih sebagai PK. Hal ini dapat dilihat dari capaiannya yang fenomenal pada pemilu 2004. Perolehan suara PKS naik tajam bila dibandingkan perolehan suara PK pada pemilu 1999. Di daerah pemilihan DKI Jakarta, daerah yang memiliki makna tersendiri dari segi politik, PKS keluar sebagai pemenang. Jakarta adalah indikator bagi arena perpolitikan nasional. Jakarta adalah “bukti” keberhasilan sebuah parpol sehingga sejak pemilu di zaman Orde Baru selalu menjadi impian setiap parpol. Golkar, partai berkuasa kala itu, sempat kecewa berat ketika PPP menguasai Jakarta pada pemilu 1982.²²

Keberhasilan PKS dengan ideologi Islamnya dalam pemilu 2004 telah mengundang rasa ingin tahu para pemerhati politik baik dari dalam maupun luar negeri.²³ Dr. Greg Fealy, seorang pengajar dalam kajian politik Indonesia pada The Australian National University, menyebutkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah fenomena yang paling menarik dalam politik kontemporer Indonesia. Menurutnya, hal itu bukan hanya karena perkembangan partai yang sangat pesat dalam hal keanggotaan dan perolehan suara dalam pemilu, tetapi juga karena PKS menawarkan pendekatan baru dan

²¹ Anis Matta, *op.cit.*, hlm. 40-41

²² Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, 2004, Jakarta: Granit hlm. 5

²³ Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, 2005, Bandung: Harakunta Publishing hlm. 1

berbeda dalam politik Islam yang hampir tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia.²⁴

Pendekatan baru tersebut, menurutnya dapat ditelusuri dengan melihat beberapa hal penting berikut. *Pertama*, tidak seperti partai-partai Islam yang lain, PKS mengambil sumber inspirasi ideologi dan organisasi utamanya dari luar dan menjadikan pemikiran Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai model acuan. Perhatian mereka terhadap peristiwa-peristiwa di Timur-Tengah sangat besar. Hal itu bisa diamati dari munculnya buku-buku Ikhwanul Muslimin yang diterjemahkan dan diterbitkan anggota-anggotanya, banyaknya rujukan mereka terhadap Hasan Al Banna atau Sayyid Qutb dalam dokumen-dokumen atau website, dan lukisan-lukisan menarik dari peristiwa di Timur-Tengah, seperti simbol Hamas dan kaos bergambar pemuda palestina sedang melempar batu kepada tentara-tentara Israel.²⁵

Kedua, PKS adalah satu-satunya partai kader yang murni dalam politik Indonesia saat ini. PKS memiliki proses rekrutmen yang khusus dan ketat, training, dan seleksi anggota yang dapat menghasilkan kader-kader dengan komitmen tinggi dan disiplin. *Ketiga*, PKS adalah satu satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan sosial yang efektif. Program-program itu antara lain, bantuan emergensi bagi para korban bencana alam seperti, tsunami, gempa, banjir, kebakaran hingga pelayanan kesehatan umum dan gigi yang diberikan secara kontinyu dan gratis bagi masyarakat miskin. *Keempat*, PKS

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

menjadikan moralitas dalam kehidupan publik sebagai program utama politik.²⁶

Empat “keistimewaan” di atas menjadikan PKS sebagai partai yang sangat serius tentang masalah ideologi dan kebijakan dibanding partai-partai besar lainnya. Di saat partai-partai lain menampakkan kurangnya perhatian mereka dalam hal nilai dan tujuan yang harus dicapai, PKS menunjukkan besarnya wacana internal partai tentang isu-isu yang bersifat konseptual dan doktrinal. Sejumlah buku, majalah, dan dokumen dalam website yang dihasilkan oleh anggota-anggota PKS jauh melebihi apa yang dihasilkan oleh partai lain.²⁷

Studi ini mencoba meletakkan PKS sebagai sebuah entitas politik yang melakukan komunikasi politik. Khususnya seputar prosesnya dalam memerankan diri sebagai sebuah institusi dakwah politik kaitannya dengan pemberitaan (pencitraan/pengkonstruksian realitas) yang dilakukan oleh media massa. Bagi elit-elit politik—tidak terlepas PKS media massa merupakan alat yang efektif dalam menyebarkan dan membentuk wacana publik. Para elit politik senantiasa berusaha mempengaruhi media massa untuk mendapatkan kemenangan dalam hal wacana publik. Hal ini karena wacana publik tersebut akan menentukan persepsi dan opini publik terhadap sebuah kekuatan politik, terutama berkaitan dengan legitimasi dan delegitimasi.

Sejarah interaksi media massa dan dunia politik di Indonesia penuh dengan nuansa perebutan wacana publik. Dalam masa kolonial, strategi kaum

²⁶ *ibid*

²⁷ *ibid*

penjajah menguasai wacana publik dengan memonopoli kebenaran (pemberitaan) dan ancaman pemberangusan. Para tokoh pergerakan nasional melalui media massa Indonesia berusaha mendapat simpati dari rakyat dengan mengembangkan wacana politik tertentu, termasuk mempertanyakan legitimasi kekuasaan kaum penjajah. Pada masa Orde Lama media massa menjadi instrumen perebutan wacana antarkubu. Pada masa Orde Baru khususnya pasca peristiwa malari 1974 wacana politik dicoba dikuasai oleh penguasa. Sejak saat itu, media massa yang menampilkan pemberitaan dengan wacana yang berbeda dengan versi penguasa langsung dibreidel.²⁸

Baru setelah Indonesia memasuki era reformasi—terlebih di masa pemerintahan Gus Dur aura kebebasan pers mulai terasa. Dihapusnya Departemen Penerangan yang selama Orde Baru dianggap sebagai momok yang membayangi kehidupan pers membuat pers perlahan menggeser orientasi kepatuhan. Pemihakan media massa terpolarisasi, ada yang atas dasar ideologi dan politik, ada juga karena kepentingan pasar sehubungan media massa telah menjadi industri.²⁹

Memasuki pemilu 2004 dimana dalam relasi media massa dan politik tidak ada hegemoni tunggal lagi, diperkuat telah disahkan dan diberlakukan UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran yang mengakui keberadaan Lembaga Penyiaran Publik dan Komunitas,³⁰ memungkinkan kekuatan-kekuatan politik yang ada saling berlomba mendapatkan akses ke media massa untuk

²⁸ Ibnu Hamad, *ibid*

²⁹ *ibid*, hlm 178

³⁰ Effendi Gazali, *Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi*, dalam Jurnal Ilmu Sosial & Politik, Vol. 8, No. 1, Juli 2004

memenangi pertarungan wacana publik. PK(S) yang pada pemilu 1999 mendapatkan pengkonstruksian secara positif dari hampir semua media massa yang meliput proses pemilu tersebut³¹ pada pemilu 2004 ini tampak tidak mau kehilangan momentum.

Ada sebuah media massa yang dari waktu ke waktu memberikan ruang yang cukup lebar untuk PKS, yaitu majalah Saksi. Majalah Saksi ini sebagaimana PKS adalah representasi media dakwah yang dilakukan oleh aktivis gerakan tarbiyah. Dalam setiap edisinya, terlebih saat-saat perhelatan akbar pemilu 2004 berlangsung, majalah Saksi memberi ruang yang besar untuk pemberitaan PKS baik dalam laporan utama, laporan khusus ataupun wawancara dengan tokoh-tokoh PKS. Bila dibandingkan media massa yang lain³², *Saksi* merekam peristiwa demi peristiwa yang dialami PKS secara komprehensif. Dari sini penulis berkeyakinan bahwa untuk menelusuri kiprah dakwah politik PKS, majalah Saksi adalah pilihan paling tepat. Fokus studi ini mencoba membedah *Saksi* dalam melakukan konstruksi realitas PKS dalam laporan utamanya dengan memakai analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*).

³¹ Penelitian Ibnu Hamad tentang konstruksi realitas politik dalam media massa terhadap sembilan partai politik dalam sepuluh media massa (koran) menemukan bahwa PKS dikonstruksi secara positif oleh seluruh media massa yang diteliti tersebut. Lihat Ibnu Hamad, *op.cit.*

³² Untuk menyebut diantaranya adalah, Panji Masyarakat, Al Muslimun, Risalah, Ummi, Sabili, Suara Hidayatullah, Syir'ah, Suara Muhammadiyah, Tarbawi. Majalah-majalah ini pada pemilu 2004 telah hadir tetapi karena kecenderungan orientasi keredaksiannya lebih menitikkan pada permasalahan dakwah secara lebih umum memberikan porsi yang relatif kecil untuk pemberitaan politik apalagi tentang PKS.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah,

1. Bagaimana struktur konstruksi wacana tentang dakwah politik PKS dalam laporan utama majalah Saksi?
2. Bagaimana konteks berita tentang PKS dalam laporan utama majalah Saksi?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengungkapkan konstruksi wacana tentang dakwah politik PKS dalam pemilu 2004 oleh majalah Saksi.
2. Mendeskripsikan konteks berita PKS dalam pemilu 2004 oleh majalah Saksi.

E. Kegunaan Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap studi analisis teks berita media massa secara komprehensif, dimana teks dikaitkan secara utuh dengan konteks sosial yang relatif kurang diamati dalam penelitian-penelitian tedahulu.

F. Telaah Pustaka

Studi yang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera baik untuk kepentingan persyaratan akademik ataupun riset ilmiah murni relatif banyak

dilakukan. Akan tetapi studi yang menggunakan analisis wacana kritis sebagai pisau analisis belum banyak dilakukan—bahkan untuk tema yang lain khususnya di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam masih sangat jarang. Studi tentang PKS banyak menggunakan pendekatan filosofis, sejarah dengan pemaparan deskriptif dan naratif. Studi yang menggunakan analisis wacana kritis sebagai pisau analisis di fakultas dakwah khususnya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam belum pernah penulis dapati sebelumnya.

Beberapa intelektual yang telah melakukan studi tentang PKS misalnya;

Aay M Furkon, dengan bukunya berjudul *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, ia menganalisis dan menjelaskan dengan komprehensif jatidiri Partai keadilan Sejahtera. Buku ini sebenarnya merupakan pengembangan dari tesis penulisnya pada program pasca sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dalam buku tersebut dipaparkan akar ideologi serta praksis politiknya semenjak penyemaian embrio gerakan, proses internalisasi inspirasi gerakan, pendirian Partai Keadilan (PK), hingga metamorfosis PK menjadi PKS.

Yon Machmudi, dengan bukunya yang berjudul *Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Dalam buku yang diramu dari riset doktoralnya pada *The Australian National University*, ia memberikan penjelasan yang cukup lengkap tentang keberadaan dan latar belakang PKS sekaligus langkah dan kiprah PKS dalam kancah perpolitikan Nasional.

Ali Said Damanik, dengan bukunya yang berjudul *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Walaupun

tidak secara langsung membahas tentang PKS akan tetapi buku ini tidak bisa dipisahkan dalam studi ini. Sebagaimana diketahui publik bahwa PKS adalah metamorfosis dari PK karena perolehan suara pada pemilu 1999 tidak memenuhi *electoral treshold*. Buku ini memaparkan secara komprehensif dan detail seputar perjalanan gerakan Partai keadilan semenjak awal.

Adapun intelektual yang telah melakukan studi dengan menggunakan analisis wacana kritis sebagai berikut;

Eriyanto, dengan bukunya yang berjudul *Kekuasaan Otoriter, Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni, studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*. Dalam buku ini Eri menggunakan analisis wacana kritis untuk menganalisis pidato kenegaraan Presiden Soeharto. Menggunakan kerangka analisis Teun A van Dijk, ia mengungkap bagaimana Presiden Soeharto membuat konstruksi atas realitas bangsa Indonesia untuk kepentingan pelanggaran kekuasaannya.

Ibnu Hamad, dengan bukunya yang berjudul *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, memberikan tawaran metodologis yang cukup aplikatif untuk pengembangan studi analisis wacana kritis tentang politik. Dalam buku tersebut ia menganalisis konstruksi yang dibangun oleh sepuluh surat kabar atas sembilan kontestan partai politik.

Haryo Setyoko, dalam skripsinya yang berjudul *Berita tentang Upaya pembukaan hubungan dagang Indonesia dengan Israel oleh Presiden Abdurrahman Wahid di Harian Umum Republika (Analisis Wacana)*,

melakukan studi analisis wacana kritis. Sebagaimana Eriyanto, studi ini menggunakan kerangka analisis Teun A van Dijk. Dalam skripsi ini Haryo menjelaskan bagaimana Republika melakukan konstruksi atas diskursus yang terjadi dari ide Gus Dur—ketika menjabat Presiden RI—untuk melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Ide tersebut kemudian mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat Indonesia.

G. Kerangka Teori

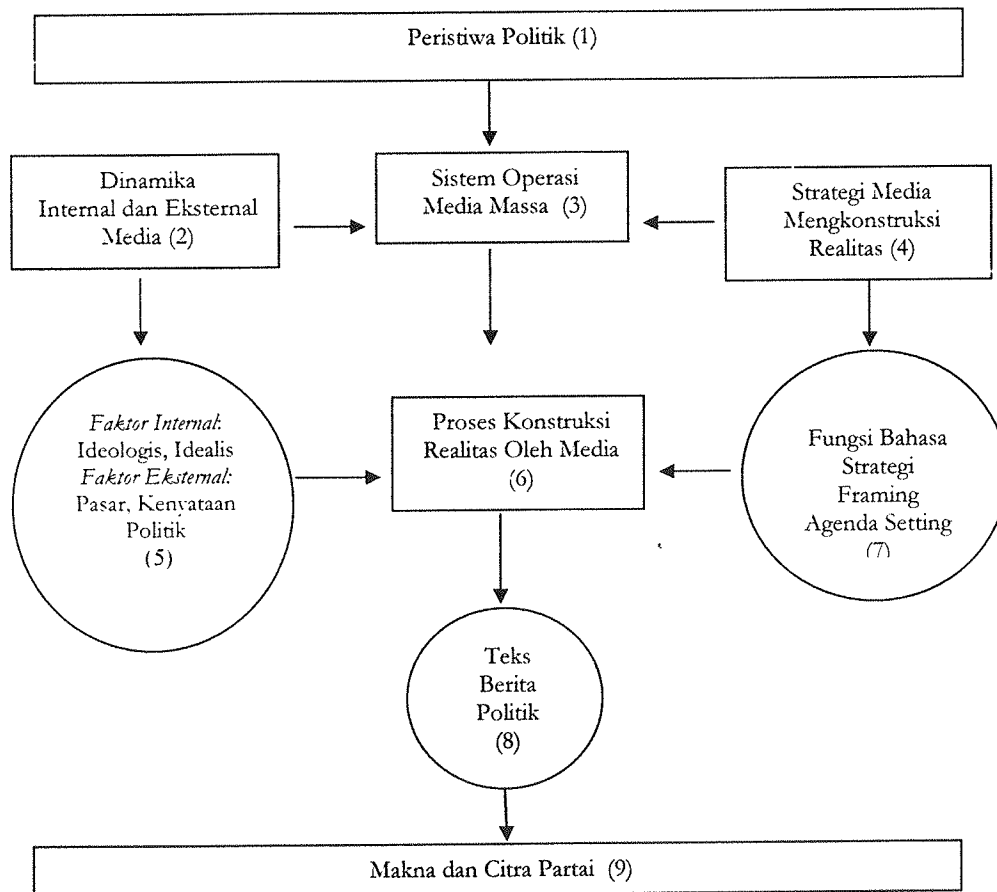
1. Media Massa dan Konstruksi Realitas Politik

1.1. Sistem Operasi Media Massa

Opini publik yang positif bagi sebuah partai politik peserta pemilu terlebih dalam masa kampanye sangat penting. Salah satu saluran pembentukan opini publik dalam dunia politik adalah media massa. Harsono Suwardi dalam memberikan kata pengantar buku *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* karya Ibnu Hamad mengungkapkan lima aspek yang membuat media massa penting dalam kehidupan politik, 1) daya jangkauannya (*coverage*) yang sangat luas dalam menyebarkan informasi politik, 2) kemampuannya melipatgandakan pesan yang luar biasa (*multiplier of message*), 3) Setiap media massa bisa mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangannya masing-masing sesuai kebijakan redaksional. 4) Fungsi agenda setting media memberi kesempatan luas untuk memberitakan atau tidak sebuah peristiwa politik, 5) Pemberitaan peristiwa politik oleh satu

media lazimnya berkaitan dengan media lainnya hingga membentuk rantai informasi (*media as links in other chains*).³³

Media massa, menurut Ibnu Hamad, dalam kerangka pembentukan opini publik melakukan tiga kegiatan sekaligus. 1) Menggunakan simbol-simbol politik, 2) Melaksanakan strategi pengemasan pesan, 3) Melakukan fungsi agenda setting.³⁴ Selanjutnya Ibnu Hamad memvisualisasikan kerangka pembentukan konstruksi realitas politik tersebut dengan sebuah bagan sebagai berikut.



³³ Suwardi Harsono, *Kata Pengantar dalam Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, 2004, Jakarta: Granit hlm. xv-xvi

³⁴ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, 2004, Jakarta: Granit hlm. 2

Secara global, bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Lahirnya teks berita politik (8) senantiasa dimulai dengan peristiwa politik (1). Pengkonstruksian realitas politik (6) hingga membentuk makna dan citra tertentu (9) tergantung pada faktor sistem media massa yang berlaku. Proses pembuatan berita politik dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal media (2) dan (5) serta perangkat pembuatan wacananya sendiri (4) dan (7).³⁵

Mengacu bagan di atas, salah satu faktor yang memberi pengaruh signifikan terhadap proses pembuatan atau pengkonstruksian realitas politik hingga jenis opini yang terbentuk adalah sistem dimana sebuah media menjalankan operasi jurnalistiknya. Seperti apa konstruksi realitas politik yang dibentuk oleh sebuah media dipengaruhi oleh kehidupan sistem politik dimana media massa menjadi salah satu subsistemnya.³⁶ Sehingga tidak bisa dipisahkan relasi antara pelaku politik³⁷ (institusi/individu) dan media massa. Dalam liputan politik di lapangan, interaksi antara media massa dan pelaku politik saling mempengaruhi. Pelaku politik merupakan sumber berita bagi media massa, sebaliknya media massa sering menjadi sumber informasi disamping saluran komunikasi bagi para politisi.

Faktor selanjutnya adalah strategi media mengkonstruksi realitas. Ibnu Hamad menjelaskan bahwa Proses konstruksi realitas adalah “setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak

³⁵ *ibid, hlm. 4-6*

³⁶ *ibid, hlm. 7*

³⁷ Pelaku politik ini merujuk pada para pemain politik antara lain pejabat formal negara seperti presiden, menteri, ketua MPR; pemimpin partai politik dll.

terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik³⁸. Misalnya, laporan tentang kegiatan orang yang berkumpul di sebuah lapangan terbuka mendengarkan pidato politik pada musim pemilu adalah hasil konstruksi realitas mengenai peristiwa yang biasa disebut kampanye pemilu.

1.2. Strategi Media Massa Melakukan Konstruksi Realitas

Elemen dasar seluruh isi media massa adalah bahasa. Isi media cetak adalah bahasa tertulis baik berbentuk kata, angka, ataupun gambar. Bahasa adalah *ruh* yang menghidupi media massa. Setiap hari, para pekerja media memanfaatkan bahasa dalam menyajikan berbagai realitas (peristiwa, keadaan, benda) kepada publik. Dengan bahasa secara massif mereka menentukan gambaran realitas ke dalam benak masyarakat.³⁹

Merujuk pada temuan Ibnu Hamad, terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan oleh pekerja tatkala melakukan konstruksi realitas menjadi sebuah wacana, yaitu: pemilihan simbol (fungsi bahasa), pemilihan fakta yang akan disajikan (strategi framing) dan kesediaan memberi tempat (agenda setting). *Pertama*, pilihan kata (simbol) politik. Dalam komunikasi politik, para komunikator bertukar citra atau makna tertentu melalui lambang politik. Mereka saling menginterpretasikan pesan-pesan (simbol-simbol) politik yang diterimanya. Dalam konteks majalah, sekalipun melakukan pengutipan langsung (*direct quotation*) atau menjadikan seorang komunikator politik sebagai sumber berita, media massa tetap terlibat—langsung ataupun tidak

³⁸ *Ibid*, hlm. 11

³⁹ *ibid*, hlm 15

langsung—dengan pilihan simbol yang digunakan sumber tersebut. Pengambilan satu narasumber tentu didasarkan atas pertimbangan tertentu. Apalagi manakala majalah tersebut membuat ulasan, pilihan kata (simbol) itu ditentukan sendiri.⁴⁰

Kedua, Strategi framing. Karena keterbatasan kolom dan halaman pada majalah hampir tidak pernah ada yang membuat berita sebuah peristiwa secara utuh mulai dari menit pertama kejadian hingga menit akhir. Atas nama kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, rumit, dicoba “disederhanakan” melalui mekanisme pembingkaiian (framing) fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit. Untuk kepentingan pemberitaan tersebut, pekerja media seringkali hanya menyoroti hal-hal yang “penting” (mempunyai nilai berita) dari sebuah peristiwa politik.

Pembuatan frame itu sendiri didasarkan atas berbagai kepentingan internal maupun eksternal media baik teknis, ekonomis, politis ataupun ideologis. Sehingga pembuatan sebuah wacana tidak saja mengindikasikan adanya kepentingan-kepentingan itu, tetapi juga bisa mengarahkan: hendak kemana isu yang diangkat dalam wacana tersebut. Cara membentuk wacana di media massa adalah dengan mengemas (*packanging*) realitas ke dalam sebuah struktur sehingga sebuah isu mempunyai makna.⁴¹

Ketiga, menyediakan ruang untuk sebuah peristiwa politik (fungsi agenda setting). Besarnya perhatian masyarakat terhadap sebuah isu amat tergantung seberapa besar media memberikan perhatian pada isu tersebut. Bila sebuah

⁴⁰ *ibid*, hlm 16

⁴¹ *ibid*, hlm 22

majalah menaruh sebuah kasus dalam laporan utama diasumsikan kasus tersebut pasti memperoleh perhatian yang besar dari khalayak. Beda misalnya jika kasus itu dicantumkan di kolom selingan.⁴²

Dengan tiga tindakan tersebut, gambaran mengenai sebuah realitas partai politik amat bergantung bagaimana media massa memberi julukan, mengurut-urutkan fakta, dan memberi kesempatan pengkomunikasiannya kepada khalayak. Tindakan pertama dan kedua dapat diamati implementasinya dalam sebuah teks berita. Sementara tindakan ketiga dapat dilihat pada penempatannya dalam sebuah majalah.

Dalam studi ini, karena fokus utamanya analisis teks laporan utama majalah saksi, secara otomatis sudah terjawab bahwa majalah saksi memberi ruang utama dan menganggap wacana tentang dakwah politik Partai Keadilan Sejahtera sangat penting dan harus diketahui publik. Sementara untuk tindakan pertama dan kedua dapat dilihat dengan melakukan analisis framing. Salah satu model analisis framing adalah apa yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani. Gamson dan Modigliani berpendapat bahwa dalam wacana berita terdapat paket-paket gagasan yang memberikan makna tentang suatu isu. Setiap paket itu mempunyai struktur gagasan inti yang disebut “bingkai” (“*frame*”) atau “gagasan sentral yang terorganisasi”⁴³

Ada dua perangkat bagaimana ide sentral ini diterjemahkan dalam teks berita. *Pertama, framing device* (perangkat framing). Perangkat ini berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide/gagasan sentral. Perangkat

⁴² *ibid*, hlm 24

framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar, dan metafora tertentu. *Kedua, reasoning devices* (perangkat penalaran). Perangkat penalaran berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan sentral. Lewat aspek penalaran tersebut, khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak sebagai kebenaran, alamiah, dan wajar. Sebaliknya, kalau tidak ada penalaran demikian, gagasan akan tampak aneh, tidak beralasan, dan orang dengan mudah mempertanyakan pesan atau gagasan tersebut.⁴⁴

Perangkat framing yang dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁵

Frame <i>Central organizing idea for making sense of relevant events, suggesting what is at issues</i> (Gagasan sentral)	
Framing Devices (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methapors Perumpamaan atau pengandaian	Roots Analisis kausal atau sebab akibat
Catchphrases Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	Appeals to Principle Premis dasar, klaim-klaim moral
Exemplaar Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.	Consequences Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai
Depiction Penggambaran atau pelukisan suatu	

⁴⁴ Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, 2002, Yogyakarta: Lkis, hlm. 224-227

⁴⁵ *ibid*, hlm 225

isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.	
Visual Images Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan.	

2. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA)

2.1. Paradigma Kritis

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Analisis Wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inhern yang disebut wacana. Dalam upaya menganalisis unit bahasa yang lebih besar dari kalimat tersebut, analisis wacana tidak terlepas dari pemakaian kaidah berbagai cabang ilmu bahasa, seperti halnya semantik, sintaksis, morfologi dan fonologi.⁴⁶ Para ahli membedakan paradigma yang mendasari penelitian analisis wacana ini, yaitu positivis dan kritis.⁴⁷

⁴⁶ Eriyanto, *Kekuasaan Otoriter, Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni, studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*, 2000, Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar

⁴⁷ Beberapa ahli sarjana komunikasi membedakan paradigma positivis (empiris) dan kritis. Positivis menekankan objektivitas, orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya, sebab yang penting adalah apakah pernyataan dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik. Paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Lihat Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar analisis Teks Media*, 2001, Yogyakarta: LKiS hlm. 4-7, lihat juga Akhmad Zaini abar, *Aliran Empiris dan Kritis dalam Penelitian Komunikasi Massa*, dalam, *Menuju Paradigma Baru Penelitian Komunikasi*, Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol III/April 1999, hlm. 52-55

Analisis wacana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis wacana yang masuk dalam pendekatan kritis atau yang biasa disebut dengan istilah *Critical Discourse Analysis (CDA)*. Paradigma kritis mempunyai pandangan tersendiri terhadap berita. Paradigma positivistik percaya bahwa wartawan dan media adalah entitas yang otonom, dan berita yang dihasilkan haruslah menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Sementara paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat digambarkan selengkapnyanya sebagai berikut:⁴⁸

PANDANGAN POSITIVISTIK	PANDANGAN KRITIS
Fakta	
Ada fakta yang real yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal	Fakta merupakan hasil dari proses pertarungan antara kekuatan ekonomi, politik, dan social yang ada dalam masyarakat
Berita adalah cerminan dan refleksi kenyataan. Oleh karena itu, berita haruslah sama dan sebangun dengan faktayang hendak diliput	Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas, karena berita yang terbentuk hanya cerminan dari kepentingan kekuatan dominant.
Posisi Media	
Media adalah sarana yang bebas dan netral tempat semua kelompok masyarakat saling berdiskusi yang tidak dominan.	Media hanya dikuasai oleh kelompok dominan dan menjadi sarana untuk memojokkan kelompok lain.

⁴⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar analisis Teks Media*, 2001, Yogyakarta: LKIS hlm 31-33

Media menggambarkan diskusi apa yang ada dalam masyarakat	Media hanya dimanfaatkan dan menjadi alat kelompok dominan
---	--

Posisi Wartawan

Nilai dan ideology wartawan berada di luar proses peliputan berita	Nilai dan ideology wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa
Wartawan berperan sebagai pelapor	Wartawan berperan sebagai partisipan dari kelompok yang ada dalam masyarakat
Tujuan Peliputan dan penulisan berita: eksplorasi dan menjelaskan apa adanya memburukkan kelompok	Tujuan Peliputan dan penulisan berita: Pemihakan kelompok sendiri dan atau pihak lain
Penjaga gerbang (gatekeeping)	Sensor diri
Landasan etis	Landasan ideologis
Profesionalisme sebagai keuntungan	Profesionalisme sebagai control
Wartawan sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran	Sebagai pekerja yang berbeda dalam kelas sosial

Hasil Liputan

Liputan dua sisi, dua pihak, dan kredibel	Mencerminkan ideologi wartawan dan kepentingan sosial, ekonomi, atau politik tertentu
Objektif, menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pemberitaan	Tidak objektif, karena wartawan adalah bagian dari kelompok/struktur social tertentu yang lebih besar
Memakai bahasa yang tidak menimbulkan penafsiran yang beraneka	Bahasa menunjukkan bagaimana kelompok sendiri diunggulkan dan memarjinalkan kelompok lain.

Berita dengan demikian dipahami sebagai sebuah hasil konstruksi yang mencerminkan ideologi dan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik awak media. Netralitas wartawan ataupun institusi media massa tidak diakui. Media diyakini sebagai sarana kelompok dominan untuk memojokkan kelompok lain. Begitu juga wartawan, tidak dilihat sebagai pelapor yang netral dan objektif akan tetapi dilihat sebagai pekerja yang memiliki kelas sosial dan ideologi tertentu yang mau tidak mau *include* dalam proses peliputan.

Aliran kritis melihat struktur sosial sebagai konteks yang sangat menentukan realitas, proses, dan dinamika komunikasi termasuk komunikasi massa. Bagi aliran ini penelitian komunikasi massa yang mengabaikan konteks sosial sebagai penelitian yang ahistoris. Melihat proses yang terjadi dalam komunikasi massa harus dengan pandangan holistik, karena komunikasi tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Aspek ini tidak mendapat tempat yang memadai dalam tradisi positivisme yang lebih melihat proses komunikasi sebagai proses yang netral.⁴⁹ Jalaludin Rakhmat, dalam artikelnya bertajuk *Kritik Paradigma pasca positivisme terhadap Positivisme* yang dimuat dalam Jurnal Ikatan sarjana Komunikasi Indonesia Vol III/April 1999, mengutip Psatas, bahwa objek, orang, situasi, dan peristiwa tidak memiliki makna, tetapi diberi makna. Pemberian makna terjadi dalam interaksi sosial. Makna adalah hasil negosiasi karenanya, tugas peneliti bukan memaksakan makna pada subjek, akan tetapi

⁴⁹ *ibid*, hlm 48

mengkonstruksi realitas. "Penelitian adalah upaya menemukan *'what they are experiencing, how they interpret their experience, and how they themselves structure the social world in which they live.'*"⁵⁰

Paradigma kritis yang memiliki pandangan tersendiri terhadap teks berita, maka dalam melakukan penelitian teks berita juga terdapat karakteristik tersendiri. Dalam studi teks berita, paradigma kritis berpandangan bahwa berita bukanlah sesuatu yang netral, dan menjadi ruang publik dari berbagai pandangan yang berseberangan dalam masyarakat. Media adalah ruang di mana kelompok dominan menyebarkan pengaruhnya dengan meminggirkan kelompok lain yang tidak dominan. Oleh karena itu, konsentrasi analisis pada paradigma kritis adalah menemukan kekuatan yang dominan dalam memarjinalkan kelompok yang tidak dominan.⁵¹

Sebagaimana dalam memandang fakta, posisi media, posisi wartawan dan hasil liputan yang khas, dalam melakukan penelitian dengan paradigma kritis juga memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan penelitian dengan paradigma positivis. Perbedaan itu bisa digambarkan dalam tabel berikut ini:

⁵⁰ Jalaludin Rakhmat, *Kritik Paradigma Pasca Positivisme terhadap Positivisme*, dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol III/April 1999, hlm. 66

⁵¹ Pada awalnya, minat khusus dari analisis wacana kritis dalam pemberitaan adalah menemukan dan mengkritisi bagaimana kelompok minoritas—wanita, buruh pabrik, imigran gelap, petani penggarap, diberitakan dan dimarjinalkan dalam pemberitaan. Tapi dalam studi ini, penulis tidak melakukan penelitian dalam konteks yang demikian, melainkan penulis ambil pandangan besarnya saja. Memang, wacana dakwah politik yang terinstitusi dalam PKS merupakan wacana marjinal, akan tetapi media yang penulis analisis adalah media Islam yang juga belum berada pada posisi mainstream. Sehingga konteks sebagaimana aliran ini dikembangkan pada mulanya tidak sebangun. Lihat *ibid*, hlm 49, lihat juga, Teun A van Dijk, *Rasisme Baru Dalam Pemberitaan Di Media*, dalam Sandra Kartika (ed), *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman; Wacana Multikultural Dalam Media*, 1999, Jakarta: LSPP

PARADIGMA POSITIVISTIK	PARADIGMA KRITIS
Cara Penelitian	
Objektif Analisis teks tidak boleh menyertakan penafsiran individu	Subjektif Titik perhatian analisis pada penafsiran peneliti atas teks
Intervensionis Pengujian hipotesis dalam struktur hipotesis dalam struktur hypothetic-deductive method dengan analisis kuantitatif dan tes statistik	Partisipatif Mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial
Kriteria Kualitas Penelitian: Objektif, reliable dan valid	Kriteria kualitas penelitian: Historical situadness: sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari teks berita

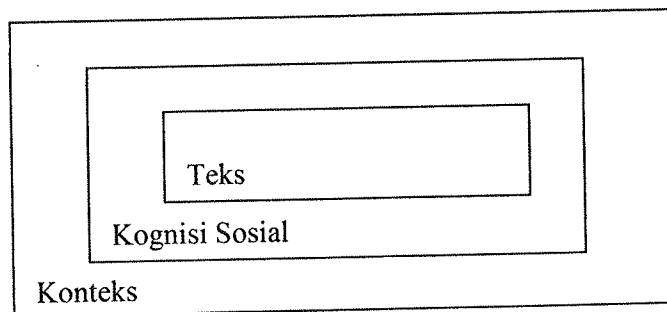
2.2. Model Analisis Teun A van Dijk

Sebagai kerangka analisis, penulis menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh Teun A van Dijk, seorang pengajar studi wacana pada University of Amsterdam Belanda.⁵² Teun A van Dijk menawarkan sebuah model yang dapat dijadikan kerangka analisis yang menggabungkan pembahasan teks maupun konteks. Hal ini dilaterbelakangi kecenderungan teori-teori komunikasi tidak melihat permasalahan secara integral dan seolah melupakan konteks struktural. Sebaliknya ilmu-ilmu sosial seringkali menjelaskan fenomena komunikasi pada tingkat makro, namun menafikan

⁵² www.hum.uva.nl/teun

teks.⁵³ Model yang dipakai van Dijk ini sering disebut sebagai "kognisi sosial."⁵⁴

Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis.⁵⁵ Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Model dari analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Menurut van Dijk, titik kunci dalam memahami produksi berita adalah dengan meneliti proses terbentuknya teks. Produksi berita sebagian dan terutama terjadi pada proses mental dalam kognisi seorang wartawan. Analisis kognisi sosial yang memusatkan perhatian pada struktur mental, proses

⁵³ Junarto Imam Prakoso, *Konstruksi Wacana Tentang Islam dan Sekular dalam media massa Nasional Selama Pemilu 1999 (Kasus Republika dan Rakyat)*, 1999, Skripsi, Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik UI

⁵⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar analisis Teks Media*, 2001, Yogyakarta: LKiS hlm. 221

⁵⁵ *ibid.* hlm.224

pemaknaan, dan mental wartawan membantu memahami fenomena tersebut sebagai bagian dari proses produksi berita. Hal yang sama terjadi pada diri khalayak yang membaca suatu teks berita. Konstruksi khalayak atas suatu peristiwa mempengaruhi pembacaan dan pemahaman mereka atas berita yang ditulis oleh wartawan.⁵⁶

Analisis kognisi sosial menekankan, bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan, dianalisis, dan ditafsirkan ditampilkan dalam suatu model dalam memori. Model ini menggambarkan bagaimana: tindakan atau peristiwa yang dominan, partisipan, waktu dan lokasi, keadaan, objek yang relevan, atau perangkat tindakan dibentuk dalam struktur berita. Wartawan menggunakan model untuk memahami peristiwa yang tengah diliputnya. Strategi yang dilakukan adalah: pertama, seleksi. Kedua, reproduksi. Ketiga, penyimpulan. Keempat, transformasi lokal.

Pertama, Seleksi adalah strategi yang kompleks yang menunjukkan bagaimana sumber, peristiwa, informasi diseleksi oleh wartawan untuk ditampilkan ke dalam berita. Proses seleksi ini menunjukkan posisi yang diambil ditengah-tengah pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Hal ini biasa terjadi sat wartawan harus mengambil keputusan menggunakan sumber berita yang satu daripada yang lain atau lebih memilih mengikuti konferensi pers dibandingkan wawancara. *Kedua*, reproduksi, hal ini berhubungan dengan apakah informasi dikopi, digandakan atau tidak dipakai sama sekali, misalnya sumber berita dari kantor berita atau *press release*. *Ketiga*,

⁵⁶ Eriyanto, *op.cit.* hlm. 266-267

penyimpulan/peringkasan informasi, yaitu bagaimana peristiwa yang kompleks dipahami dan ditampilkan dengan ringkas. *Keempat*, transformasi lokal, yaitu bagaimana peristiwa akan ditampilkan. Dengan strategi ini teks yang terbentuk akan membentuk pemahaman tertentu sebagaimana wartawan memahami peristiwa tersebut dalam suatu model tertentu. Dengan strategi ini teks yang terbentuk akan membentuk pemahaman tertentu sebagaimana wartawan memahami peristiwa tersebut dalam suatu model tertentu.⁵⁷

Wacana media adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks media perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Menurut van Dijk dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin yang penting: **kekuasaan** dan **akses**. Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok (atau anggotanya) untuk mengontrol kelompok (atau anggota) dari kelompok lain. Selain kontrol yang bersifat langsung dan fisik, kekuasaan juga berbentuk persuasif: tindakan seseorang untuk secara tidak langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan. Akses yang lebih besar berkesempatan untuk mengontrol kesadaran khalayak lebih besar serta menentukan topik dan isi wacana apa yang dapat disebarkan dan didiskusikan kepada khalayak.⁵⁸

⁵⁷ *ibid.* hlm. 268 - 271

⁵⁸ Eriyanto, *op.cit.* hlm. 271 -274

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian (Unit Analisis)

Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan utama majalah Saksi. Laporan utama majalah Saksi dipilih sebagai unit analisis untuk menyingkap keterkaitan antara konteks sosial dengan konsep dakwah politik, karena majalah Saksi merupakan salah satu majalah Islam di Indonesia yang memiliki kedekatan ideologis dengan PKS dan dalam setiap laporan utamanya memberi porsi besar untuk pemberitaan seputar PKS.

Adapun teks yang penulis analisis adalah berita utama (berbentuk artikel/feature berisi analisis mendalam) yang terdapat dalam laporan utama majalah Saksi No 6 Tahun VI, 14 Januari 2004 hingga No 12 Tahun VI, 14 April 2004. Periode ini penulis pilih karena dalam rentang waktu tersebut sedang berlangsung rangkaian perhelatan akbar bangsa Indonesia, yaitu pemilu 2004 (dalam hal ini pemilu legislatif). Pada saat itu partai politik peserta pemilu sedang berlaga mencari simpati. Dalam setiap edisi, majalah SAKSI menghadirkan kisah perhelatan tersebut dalam laporan utamanya.

2. Kerangka Analisis

Inti analisis ini menggabungkan tiga dimensi wacana, yaitu: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam satu kesatuan analisis.

a. Analisis Teks

Analisis teks bertujuan mengungkap makna, yaitu menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan

seseorang atau peristiwa tertentu. Penulis menggunakan model analisis teks yang ditawarkan oleh Ganson dan Modigliani.

b. Analisis Kognisi Sosial

Analisis kognisi sosial bertujuan meneliti mental individu wartawan. Bagaimana pandangan wartawan dipakai secara strategis untuk menghasilkan teks. Ini berkaitan dengan kegiatan rutin kelembagaan yang berkaitan dengan proses mental dalam kognisi seorang wartawan hingga terciptanya teks berita (proses produksi berita/kebijakan redaksional).

c. Analisis Konteks Sosial

Van Dijk menekankan pentingnya melakukan analisis intertekstual untuk mengetahui bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Titik pentingnya adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimasi. Dalam analisis ini ada dua poin penting yaitu, **praktik kekuasaan dan akses mempengaruhi wacana.**

3. Metode Pengumpulan Data

Kerangka analisis van Dijk berimplikasi bahwa setiap jenjang pengamatan mempunyai metode pengumpulan data masing-masing. Pada jenjang teks, penulis melakukan dokumentasi seluruh edisi majalah SAKSI yang masuk dalam unit analisis. Untuk jenjang kognisi sosial, penulis mengumpulkan data dan informasi yang bisa memberi informasi tentang

kognisi wartawan ataupun redaktur majalah SAKSI. Untuk jenjang konteks sosial, penulis melakukan studi literatur agar gambaran konteksnya lebih komprehensif saat melakukan analisis intertekstual.

I. Sistematika Penulisan

Studi ini penulis bagi dalam empat bagian. Bagian pertama memberikan pengantar menuju konteks permasalahan, dimana latar belakang masalah, kerangka teori dan kerangka penelitian (metodologi) tercakup di dalamnya. Salah satu konsekuensi penggunaan paradigma kritis adalah keharusan dipertimbangkannya aspek-aspek historis dan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi-politik yang mempengaruhi masalah sosial yang menjadi penelitian, yaitu perilaku media (dalam hal ini majalah Saksi) mengkonstruksikan dakwah politik PKS. Untuk itu di bagian kedua akan penulis sajikan sejarah dan perkembangan Saksi. Bagian ketiga penulis sajikan analisis intertekstual yang mengaitkan analisis teks dengan kognisi sosial sekaligus konteks sosial sehingga bisa dijelaskan bagaimana konstruksi wacana yang dilakukan oleh majalah Saksi terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Pada bagian keempat dilakukan penarikan kesimpulan dan saran pengembangan studi ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sikap subjek terhadap objek akan sangat dipengaruhi bagaimana subjek memandang objek tersebut. Bagaimana subjek memandang objek tergantung pada cara pandang yang digunakan. Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial ada beragam cara pandang yang digunakan subjek (peneliti) dalam melihat objek (yang diteliti). Paradigma kritis sebagai salah satu aliran dalam bidang metodologi penelitian sosial, beranggapan bahwa makna adalah hasil interaksi antara subjek dengan objek secara historis dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Paradigma kritis inilah yang penulis gunakan sebagai landasan teori analisis wacana dalam studi ini. Paradigma kritis melihat struktur sosial sebagai konteks yang sangat menentukan realitas, proses, dan dinamika komunikasi termasuk komunikasi massa. Bagi aliran ini penelitian komunikasi massa yang mengabaikan konteks sosial sebagai penelitian yang *ahistoris*. Melihat proses yang terjadi dalam komunikasi massa harus dengan pandangan *holistik*, karena komunikasi tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Aspek ini tidak mendapat tempat yang memadai dalam tradisi positivisme yang lebih melihat proses komunikasi sebagai proses yang netral.

Dalam kerangka demikian studi ini melihat majalah Saksi sebagai media yang menyajikan berita sebagai sebuah hasil konstruksi yang mencerminkan ideologi dan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik awaknya. Majalah Saksi akan berusaha menyampaikan pesan kepada publik dengan beragam strategi dalam meyakinkan

pembacanya. Pesan yang kemudian *manifest* dalam teks berita (laporan) dan kemudian menjadi wacana tersebut dipahami sebagai konstruksi wacana oleh majalah Saksi.

Konstruksi wacana tersebut penulis telusuri dengan menggunakan analisis wacana yang diperkenalkan oleh Teun A van Dijk. Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam level teks terungkap bahwa majalah Saksi melakukan strategi pembingkaiian (*framing*) tertentu tentang dakwah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Segala aktivitas PKS mendapatkan porsi yang dominan dan selalu positif yang diupayakan nampak wajar dan demikian adanya untuk meyakinkan pembaca. Frame yang tampak menonjol selama masa pemilu 2004 adalah “PKS, partai dakwah paling layak dipilih” yang disajikan secara sistematis. Diawali dengan maraknya poling yang melejitkan nama PKS dan Presidennya, Hidayat Nurwahid karena selalu menempati papan atas di hampir setiap poling yang digelar tersebut. Dari analisis teks di atas, tampak jelas *Saksi* mengerangkakan wacana mengenai siapa saja yang pantas menerima legitimasi dan delegitimasi. Objek pembicaraan “kita”, yang merujuk pada PKS ditampilkan dengan menonjolkan segi positif, sedangkan “mereka”, yang merujuk pada rival politik khususnya kekuatan politik yang pernah berkuasa sebelumnya diangkat menyoroti segi negatif. Redaksi secara sengaja menentukan pilihan diksi dan struktur kalimat guna membentuk makna secara keseluruhan.

Dalam level kognisi sosial dapat dilihat bahwa *Saksi* sudah memiliki seperangkat pengetahuan seputar pemilu 2004. Bagaimana peta kekuatan yang bersaing memperebutkan suara pemilih dan bagaimana harus bersikap ditengah persaingan tersebut. Para awak *Saksi* direkrut dari latar belakang sosiologis yang sama, rata-rata mereka pernah bersentuhan dengan aktivitas dakwah di kampus. Relasi ini membuat

keduanya (*Saksi* dan PKS) memiliki orientasi ideologis dan politis yang relatif 'sejalan'. Sehingga bisa dimengerti bagaimana bisa terjadi konstruksi seperti itu.

Reformasi 1998 yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial politik di Indonesia memungkinkan tersedianya ruang publik bagi wacana-wacana yang pada masa Orde Baru terpinggirkan. Wacana Islam politik yang pada masa Orde Baru berasosiasi dengan tindakan subversif dan mengarah pada upaya pendirian negara Islam sebagaimana pernah dilakukan oleh DI/TII. Memori publik Indonesia yang seperti itu telah menjadi sebuah diskursus lama dalam internal umat Islam yang berpengaruh dalam melakukan dakwah. Dalam konteks ini dakwah kemudian dikenal dengan istilah dakwah kultural dan dakwah struktural (politik). Reformasi 1998 telah mendekonstruksi banyak konsensus yang terbentuk saat Orba. Asas tunggal pancasila tidak lagi menjadi keharusan, sehingga bermunculanlah ormas ataupun parpol dengan asas yang beragam, seperti agama, sosialis, nasionalis, marhaenis dan lain-lain. Salah satu yang mengemuka adalah berdirinya partai berasas Islam yang mendeklarasikan diri sebagai institusi dakwah politik, yaitu Partai Keadilan yang pada pemilu 2004 berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ditinjau dari paradigma kritis serta kerangka analisis wacana kritis, dapat dikatakan bahwa dibalik realitas yang teramati pada level teks terdapat realitas kesejarahan yang berpengaruh atas sebuah proses konstruksi. Pemilu 2004, yang dipandang awak *Saksi* sebagai titik kritis—ada kecenderungan terjadinya konsolidasi otoriterian ditengarai menyebarnya "SARS" (Syndrom Amat Rindu Soeharto) dikalangan masyarakat kecil, terjadinya koalisi tiga kaki yang diusung Golkar, PDIP dan PPP—menghajatkannya yang merasa sebagai bagian kekuatan reformis untuk mengantisipasi hal tersebut. *Saksi* yang memiliki orientasi ideologis dan politis relatif sejalan dengan Partai Keadilan Sejahtera mengkonstruksi PKS secara positif dari waktu ke waktu bahkan membuat bingung secara sistematis yang mengarahkan kepada publik bahwa PKS sebagai partai dakwah paling

layak dipilih. Secara ekonomis ternyata *Saksi* juga memiliki kepentingan, yaitu menjadikan kader PKS sebagai *captive market* (segmen utama pemasaran).

Saksi menyajikan laporan utama dengan gagasan sentral “PKS, partai dakwah paling layak dipilih” secara sistematis. Bingkai “PKS partai dakwah paling layak dipilih” menunjukkan secercah harapan ditengah kondisi bangsa yang carut-marut hanya pada PKS. Diawali dengan pewacanaan bahwa PKS menjadi partai paling disukai rakyat sebagaimana diulas dalam polling. Kemudian diikuti dengan penggambaran kondisi bangsa yang penuh masalah akibat kesalahan urus dari pemerintahan sebelumnya. Juga adanya indikasi terjadi konsolidasi otoriterian sementara kekuatan reformis cenderung melemah. Hingga menjelang pemungutan suara *Saksi* mempertegas bingkainya dan mengarahkan pembaca kepada satu pilihan paling rasional yaitu Partai Keadilan Sejahtera. *Saksi* sadar melakukan hal tersebut sebagai sebuah bentuk pemihakan pada kepentingan rakyat

B. Saran-Saran

1. Pengembangan Keilmuan

Studi ini secara relatif memberi kontribusi terhadap studi analisis teks berita media massa secara komprehensif, dimana teks dikaitkan secara utuh dengan konteks sosial yang selama ini kurang diamati dalam penelitian-penelitian terdahulu. Namun penulis belum bisa memberi penjelasan paripurna seputar relasi teks-konteks dengan jembatan kognisi sosial karena keterbatasan biaya sehingga tidak memungkinkan melakukan penelitian partisipatif untuk mendapatkan data primer seputar kognisi sosial. Untuk penelitian sejenis ini hendaknya juga melakukan penelitian partisipatif, yaitu terlibat dalam alur kerja redaksi dalam rentang waktu yang cukup disamping melakukan wawancara.

dan perbuatan yang ditunjukkan para kadernya selama ini. Perolehan suara yang besar pada pemilu 2004 yang lalu membawa konsekuensi mobilitas vertikal para kadernya dalam sektor publik. Ketika kesibukan mengurus wilayah publik (anggota DPR/MPR, Menteri serta birokrat pendukung eksekutif) meniscayakan turunnya intensitas konsolidasi. Perlu diterapkan pola komunikasi yang sistemik untuk menjaga sinergitas.

Atribut partai, ketika masih menjadi Partai Keadilan sangat eksklusif. Pemiliknya terbatas para anggota dan sebagian simpatisan yang secara relatif memiliki pemahaman atas nilai-nilai dan kultur yang dianut partai. Namun kini, atribut partai telah menjadi milik sebagian besar masyarakat yang bisa jadi sangat jauh dengan kultur dan nilai yang dianut partai. Hal ini memungkinkan terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan kultur dan nilai partai dilakukan oleh orang beratribut partai. Untuk itu perlu disiapkan strategi hubungan masyarakat yang jitu untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Citra positif yang selama ini tercipta tidak terlepas dari realitas yang ditampilkan. Akan tetapi akhir-akhir ini publik terkejut dengan beberapa sikap partai yang tidak populer seperti tidak adanya perlawanan yang berarti atas kebijakan kenaikan harga BBM, tuntutan penempatan kader partai pada posisi Jaksa Agung. Indikasi tersebut membuat publik bertanya ada apa dengan PKS? Adakah sensitifitas atas penderitaan rakyat meluntur setelah menikmati kekuasaan? Kiranya petinggi partai perlu melakukan evaluasi secara kontinyu atas kiprah para kadernya yang telah menduduki kursi eksekutif maupun legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aay M Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, 2004, Jakarta: Teraju
- Abdul Mu'nim D.Z., (ed), *Islam Di Tengah Arus Transisi*, 2000, Jakarta: Kompas
- Agus Sudibyo, *citra Bung Karno, Analsisis Berita Pers Orde Baru*, 1999, Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Alex Sobur, Drs., *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, 2001, Bandung: Rosda
- Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, 2002, Jakarta: Teraju
- Andy Dermawan dkk. (ed), *Metodologi Ilmu Dakwah*, 2002, Yogyakarta: LESFI
- Anis Matta, *Menikmati Demokrasi, Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, 2002, Jakarta: Pustaka Saksi
- Bayanat Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Tentang Jihad Siyasi
- DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, 1998, Jakarta
- Effendi Gazali, *Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi*, dalam Jurnal Ilmu Sosial & Politik, Vol. 8, No. 1, Juli 2004
- Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar analisis Teks Mesia*, 2001, Yogyakarta: LKiS
- _____, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, 2002, Yogyakarta: LKiS
- _____, *Kekuasaan Otoriter, Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni, studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*, 2000, Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar
- Haryo Setyoko, *Berita tentang Upaya pembukaan hubungan dagang Indonesia dengan Israel oleh Presiden Abdurrahman Wahid di Harian Umum Republika (Analisis Wacana)*, 2001, Skripsi, Ilmu Komunikasi UGM
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, 2004, Jakarta: Granit
- Junarto Imam Prakoso, *Konstruksi Wacana Tentang Islam dan Sekular dalam media massa Nasional Selama Pemilu 1999 (Kasus Republika dan Rakyat)*, 1999, Skripsi, Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik UI
- van Dijk, Teun A, *Rasisme Baru Dalam Pemberitaan Di Media*, dalam Sandra Kartika (ed), *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman; Wacana Multikultural Dalam Media*, 1999, Jakarta: LSPP

Widodo, Amd. Dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, 2001, Yogyakarta : Absolut

Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, 2005, Bandung: Harakunta Publishing

Majalah SAKSI, No. 14 Tahun V, 22 April 2003

Majalah SAKSI, No. 15 Tahun V, 6 Mei 2003

Majalah SAKSI, No. 5 Tahun VI, 31 Desember 2003

Majalah SAKSI, No. 6 Tahun VI, 14 Januari 2004

Majalah SAKSI, No. 7 Tahun VI, 4 Februari 2004

Majalah SAKSI, No. 8 Tahun VI, 18 Februari 2004

Majalah SAKSI, No. 9 Tahun VI, 3 Maret 2004

Majalah SAKSI, No. 10 Tahun VI, 17 Maret 2004

Majalah SAKSI, No. 11 Tahun VI, 31 Maret 2004

Majalah SAKSI, No. 12 Tahun VI, 14 April 2004

Majalah SAKSI, No. 13 Tahun VI, 28 April 2004

Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Vol. III/April 1999

Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Vol. IV/Okttober 1999